

# **RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024**

**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
2024**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) PPN Palabuhanratu tahun 2024 dapat diselesaikan. RKT merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. RKT adalah dokumen perencanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan targetkinerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024 yang berpedoman dari Rencana Strategis (RENSTRA) PPN Palabuhanratu tahun 2020-2024.

Ucapan terima kasih dan penghargaan atas jerih payah dari semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan dokumen RKT ini. Semoga perikanan tangkap Indonesia semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan.

Palabuhanratu 26 Januari 2024,

Kepala Pelabuhan,



Kusuf Fathanan, S.Pi., M.Si

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	4
B Visi Misi.....	6
C Tujuan.....	7
D Dasar Hukum .....	7
E Sasaran Program.....	8
BAB 2 INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A Target Kinerja.....	10
B Kerangka Pendanaan .....	11
C Rencana Pencapaian .....	15
BAB 3 PENUTUP	
A Penutup .....	19

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan berkesinambungan. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan bersifat indikatif. RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/ Lembaga (K/L) termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara – negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/ MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada

Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Untuk itu pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut agar dapat memberikan peran dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga.

Pencapaian peran tersebut dilakukan dengan (1) penguatan kebijakan dan regulasi berdasarkan data, informasi, pengetahuan faktual, dan komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan, (2) mengoptimalkan perikanan budidaya, (3) mengembangkan perikanan tangkap, (4) membangkitkan industri kelautan dan perikanan, (5) penguatan sistem karantina ikan, (6) pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, (7) penguatan pengawasan SDKP, (8) penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan, dan (9) penguatan reformasi birokrasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2020- 2024

sebagai amanah dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang TataCara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024. Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit utama yang mengampu program pembangunan perikanan dan setiap satuan kerja yang mengampu kegiatan pembangunan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Selanjutnya berpedoman pada Rencana Aksi Program DJPT PPN Palabuhanratu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit utama, dan akan dilaksanakan oleh PPN Palabuhanratu melalui kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

## B. Visi Misi

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumberdaya Perikanan

Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diturunkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagai berikut:

1. Sebagai “Sentra Usaha Mina”, artinya bahwa wilayah PPN Palabuhanratu merupakan sentral bagi kegiatan – kegiatan perikanan dari Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang ada di Palabuhanratu, Kab. Sukabumi akhirnya akan menjadi infrastruktur dari Industri perikanan di masa mendatang;
2. “Yang Berdaya Saing”, artinya hasil produksi/ tangkapan PPN Palabuhanratu mempunyai daya mutu yang berkualitas ekspor dikarenakan sangat menjaga nilai mutu sehingga produk perikanan yang dipasarkan sangat mahal. Pada tahun 2014 Indonesia sudah mencapai tingkat kesuksesan yang mencakup kawasan pelabuhan tidak hanya sebagai TPI, tetapi juga meliputi penangkapan ikan, pelelangan, pengolahan dan pemasaran ikan. Dalam kawasan pelabuhan perikanan kedepannya diharapkan pula adanya industri/ perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi perikanan yang berwawasan pengolahan sumber daya ikan yang berkelanjutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan harus memperhatikan dampak akibat dari pemanfaatan yang berlebihan sehingga ikan tidak punah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

- Dengan pelayanan prima diharapkan para masyarakat/ nelayan/ *stakeholder* menerima kemudahan segala kebutuhannya yang sesuai dengan pelayanan yang disediakan di PPN Palabuhanratu.
- Pelabuhan sebagai kluster perikanan sekaligus pusat pertumbuhan industri perikanan terpadu hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para nelayan-nelayan kecil membuka pasar ekonomi dimana akan terjadi transaksi secara menyeluruh dalam satu lokasi yaitu di alokasikan pada PPN Palabuhanratu.
- Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu, hal ini dimaksudkan dengan peningkatan yang tinggi harus di usahakan nilai produksi yang tinggi pula, contohnya dengan peningkatan mutu ikan yang dihasilkan harus, sehat, segar, dan bebas formalin. Maka di Pelabuhanlah yang akan menyediakan wadah untuk menguji sampel ikan yang sudah bebas dari formalin. Setelah bebas dari formalin maka ikan tersebut boleh dipasarkan.
- Pelabuhan perikanan sebagai Pusat Informasi dan Data Statistik Perikanan, diharapkan kedepannya PPN Palabuhanratu adalah wakil dari seluruh Tempat Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan yang semua itu adalah wadah penghasil jumlah data dan statistik volume ikanyang di tangkap perhari, perbulan maupun pertahunnya di Palabuhanratu, Kab. Sukabumi.
- Menciptakan lingkungan pelabuhan perikanan yang bersih higienis, adalah tolak ukur dari mutu ikan yang akan dipasarkan didaerah tangkapan oleh karena itu baik cara ataupun tindakan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang bersih sangat diperhatikan.
- Pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata bahari, hal ini dikembangkan sebagai wadah Pendidikan bagi Pelajar untuk mengenalkan Bahwa Laut adalah salah satu kekayaan Indonesia yang indah dan tidak akan pernah habis, oleh karena itu dengan wadah Wisata Bahari diharapkan membangkitkan para generasi muda untuk lebih mencintai laut baik Flora maupun Fauna Laut yang ada di Ekosistem laut.
- Meningkatkan *multiplier effect* bagi masyarakat Palabuhanratu, Kab. Sukabumi melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan Pemusatan Kegiatan di Sektor Perikanan maka diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di Palabuhanratu, Kab. Sukabumi sendiri, sebagai contoh, Pekerja dalam bidang Pengasinan, Penyortiran, Pembersih, Pengeringan dan lain-lain. Hal ini juga diharapkan dengan penambahan tenaga kerja yang bekerja di areal PPN Palabuhanratu maka akan mengurangi tingkat kejahatan dengan peningkatan taraf hidup seseorang dari menganggur menjadi pekerja.
- Pelabuhan perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring dan kontrol) sumber daya ikan, tahap akhir dari semua itu diharapkan Pelabuhan Perikanan adalah media untuk mengontrol dan memonitoring baik para Nelayan/ *Stakeholder* yang ada di Palabuhanratu, Kab. Sukabumi untuk menjaga dan mengontrol Kebutuhan



Usahanya di Bidang Perikanan dalam hal Penangkapan Ikan yang Berlebih karena hal ini sudah termasuk merusak Ekosistem Laut sehingga sumber daya Ikan yang ada lambat laun akan habis dan tidak ada lagi, sehingga akan terjadi kepincangan/ ketidakseimbangan Ekosistem Darat dan laut.

## C. Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 PPN Palabuhanratu adalah sebagai acuan dan arah dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program/ kegiatan tahun 2024 mulaidari penetapan kinerja, penganggaran, dan evaluasi program/ kegiatan.

## D. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37)
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia);

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1687).

## E. Sasaran Program

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program yang dilaksanakan, antara lain:

1. Sasaran kegiatan pertama yang akan dicapai adalah “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Palabuhanratu”, dengan indikator kinerja: Penerimaan PNBP Non SDA di PPN palabuhanratu;
2. Sasaran kegiatan kedua yang akan dicapai adalah “Produktivitas perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu meningkat”, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu;
3. Sasaran kegiatan ketiga yang akan dicapai adalah “Pengelolaan PPN Palabuhanratu yang berdaya saing”, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Palabuhanratu;
  - b. Tingkat Kinerja PPN Palabuhanratu;
  - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Palabuhanratu
4. Sasaran kegiatan keempat yang akan dicapai adalah “Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Palabuhanratu yang optimal”, dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase pengendalian pengembangan fasilitas PPN Palabuhanratu;
  - b. Nilai pengendalian lingkungan di PPN Palabuhanratu.
5. Sasaran kegiatan kelima yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Palabuhanratu”, dengan indikator kinerja: Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan;
6. Sasaran kegiatan keenam yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di PPN Palabuhanratu”, dengan indikator kinerja: Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan;
7. Sasaran kegiatan kesembilan yang akan dicapai adalah “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Palabuhanratu”, dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK);
  - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Palabuhanratu;
  - c. Nilai Rekonsiliasi kinerja PPN Palabuhanratu;
  - d. Indeks Profesionalitas ASN di PPN Palabuhanratu;
  - e. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Palabuhanratu;

- f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Palabuhanratu;
- g. Nilai IKPA PPN Palabuhanratu;
- h. Nilai Kinerja PPN Palabuhanratu; dan
- i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Palabuhanratu.

# INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## A. Target Kinerja

### Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output). Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan berupa sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan serta *cascading* dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Tabel. Indikator Kinerja Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Rp. Juta)	1.188,54
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Ton)	5.800
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang berdaya saing	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen)	32
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen)	55
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	90
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	7
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	10	Nilai PM Pembangunan ZI PPN Palabuhanratu (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	80
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen)	80
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	84
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Persen)	80
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	93,76
		17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Nilai)	86
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (Indeks)	88,3

## B. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target setiap sasaran strategis, PPN Palabuhanratu telah merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2024, kegiatan PPN Palabuhanratu terbagi dalam lima output kegiatan utama, yaitu:

No	Kode	Program / Kegiatan / Output	Pagu / Target
1	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	Rp38.000.000
	ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	Rp25.000.000
	BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	Rp13.000.000
2	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Rp2.109.853.000
	BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	Rp1.442.119.000
	RAL.001	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	Rp70.000.000
	RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	Rp597.734.000
3	2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Rp4.000.000
	QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	Rp4.000.000
4	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Rp40.208.000
	QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	Rp40.208.000

No	Kode	Program / Kegiatan / Output	Pagu / Target
5	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Rp14.530.258.000
	CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp168.856.000
	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp38.000.000
	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Rp16.000.000
	EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp13.539.715.000
	EBB.951	Layanan Sarana Internal	Rp560.507.000
	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Rp30.000.000
	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp59.000.000
	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp34.000.000
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Rp84.180.000

1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Output kegiatan ini adalah:
  - Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya Target Awak kapal perikanan yang tersertifikasi adalah 30 orang. Sertifikasi yang dilaksanakan di Balai pertemuan nelayan PPN Palabuhanratu, sertifikasi yang dilaksanakan merupakan sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan.
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Output Kegiatan ini adalah:
  - Layanan kepelabuhanan perikanan yang dilaksanakan
  - Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi
  - Layanan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) yang dilaksanakan
  - Pelabuhan Perikanan yang dikelola dan operasional sesuai standar
  - Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya (PEN)
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan. Output kegiatan ini adalah:
  - Nelayan yang difasilitasi Akses Pendanaan Usahanya dengan target sebanyak 20 orang;
  - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah daerah dengan target sebanyak 1 daerah dengan kegiatan berupa Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Output kegiatan ini adalah:
  - Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan kegiatan berupa Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan;
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Output kegiatan ini adalah:
  - Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPT dengan kegiatan antara lain Layanan Perkantoran, Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Layanan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi, Layanan Sumber Daya Manusia (SDM), serta Laporan Keuangan dan BMN.

## C. Rencana Pencapaian

1. Sasaran Strategis (SS-1): Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Indikator nilai PNBP merupakan penerimaan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan, dengan tarif sebagaimana telah ditetapkan oleh PP 85 Tahun 2021 tentang Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Realisasi Nilai PNBP PPN Palabuhanratu diukur dan dilaporkan berkala setiap bulan. Target 2024 sebesar 1.188,54 juta.
2. Sasaran Strategis (SS-2): Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu meningkat. Indikator ketersediaan data produksi perikanan tangkap UPT PPN Palabuhanratu merupakan perhitungan volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan. Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Target 2024 sebesar 5.800 ton;
3. Sasaran Strategis (SS-3): Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang Berdaya Saing. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yakni:
  - a. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan perikanan. Target 2024 adalah 100%;
  - b. Tingkat kinerja PPN Palabuhanratu. Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan nilai evaluasi kinerja Pelabuhan perikanan yang diukur berdasar 4 komponen yaitu administrasi dan sistem informasi fasilitas Pelabuhan perikanan, pelayan umum serta investasi dan industri. Target 2024 adalah 83.
  - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran. Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan persentase capaian pelayanan kesyahbandaran dari STBLK, SPB, dan SHTI. Target 2024 adalah 32%.
4. Sasaran Strategis (SS-4): Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang optimal. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator yakni :
  - a. Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan perikanan dengan target 55%;
  - b. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan dengan target 30,10.
5. Sasaran Strategis (SS-5) : Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Palabuhanratu. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan. Dengan target tahun 2024 sebanyak 90 dokumen.

6. Sasaran Strategis (SS-6): Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan/awak kapal perikanan dengan target tahun 2024 sebesar 7 %.
7. Sasaran strategis (SS-7): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 9 (sembilan) indikator yakni:
  - a. Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan. Nilai ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh PPN Palabuhanratu melalui Lembar Kerja Evaluasi, karena PPN Palabuhanratu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang sudah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal serta telah ditetapkan menjadi Kawasan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2022. Target 2024 sebesar 80;
  - b. Persentase Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan. Target 2024 sebesar 80%;
  - c. Nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Dihitung dari hasil rekonsiliasi atas implementasi SAKIP di PPN Palabuhanratu dengan menggunakan instrumen (Lembar Kerja Evaluasi) Sesuai ketentuan yang berlaku. Target 2024 sebesar 94;
  - d. Indeks Profesionalitas (IP) ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018). Realisasi indikator kinerja ini diukur dan dilaporkan berkala setiap bulan untuk ASN di setiap Sub Koordinator Kelompok/Subbag di PPN Palabuhanratu. Target 2024 sebesar 84;
  - e. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Indikator ini dihitung dari hasil penilaian atas tingkat kepatuhan PBJ di PPN Palabuhanratu dengan menggunakan instrumen (Lembar Kerja Evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Target 2024 sebesar 80%;
  - f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Indikator ini dihitung dari hasil penilaian atas tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Palabuhanratu dengan menggunakan instrumen (Lembar Kerja Evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Target 2024 sebesar 80%;
  - g. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Merupakan indikator yang menunjukkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data capaian diperoleh dari Om- SPAN yang berupa Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk semester. Target 2024 ini adalah 93,76;
  - h. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Merupakan indikator yang menunjukkan suatu nilai capaian dengan membandingkan data



realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data capaian diperoleh dari Aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang berupa Nilai Kinerja untuk semester. Target 2024 ini adalah 86.

- i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dengan target 2024 sebesar 88,3.

# PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 untuk meningkatkan PPN Palabuhanratu yang terstandar. Rencana Kerja Tahunan ini memuat semua Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin.

Dengan adanya RKT ini PPN Palabuhanratu akan lebih mudah melaksanakan pengelolaan program/kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur sehingga memudahkan dalam melaksanakan seluruh kegiatan di PPN Palabuhanratu dengan baik dan terencana.

Demikian Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 di buat, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.